

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prostitusi berasal dari bahasa latin *pro-stituere* atau *pro-strauree* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, pergendekan. Prostitusi juga merupakan suatu bentuk penyimpangan seksual dengan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan adanya imbalan pembayaran (Kartono, 2005: 207).

Orang yang bekerja melayani aktivitas seksual yang bertujuan untuk mendapatkan materi atau imbalan dari yang telah menggunakan jasa mereka disebut sebagai Pekerja Seks Komersial atau secara umum biasa disingkat PSK (Koentjoro, 2004: 26). PSK merupakan sebuah fenomena beralihnya peran tubuh seseorang dari privat ke wilayah publik, yang dianggap juga oleh masyarakat sebagai pergeseran peran tubuh seseorang dari sakral ke berbagai bentuk aktivitas profan.

PSK selama ini selalu dicirikan dengan perempuan yang menjadi aktornya. Padahal pada kenyataannya sekarang ini kaum laki-laki juga sudah banyak yang menjadi PSK atau biasa disebut dengan gigolo. Ada beberapa alasan yang menyebabkan kaum laki-laki jarang dicirikan sebagai aktor PSK antara lain, yaitu pola kerja para gigolo cenderung lebih individual,

terpencar, rapi dan tersembunyi. Tidak dalam bentuk komunal yang dilokalisir oleh negara atau pemerintah daerah seperti pekerja seks perempuan. Para gigolo memiliki tingkat kerja yang cenderung beredar pada tataran kaum menengah ke atas. Gigolo memiliki daya tawar yang lebih tinggi dalam memilih para pelanggannya. Berbeda dengan pekerja seks perempuan yang nyaris dan bahkan sama sekali tidak memiliki daya tawar saat para pelanggan ingin menggunakan mereka (Hatib, 2007: 144-149).

Menurut Kartono dalam Patnani (1999: 58), selama ini diyakini bahwa faktor utama yang menjadi penyebab seseorang berprofesi sebagai PSK adalah karena keterbatasan ekonomi, sehingga menjerumuskan seorang perempuan untuk masuk ke dunia prostitusi ini demi memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Menurut Saptari dalam Suyanto (2010: 16), menyatakan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang menjadi PSK, diantaranya yang pertama karena faktor ekonomi dan kemiskinan. Kedua, karena pandangan tentang seksualitas yang lebih menekankan pentingnya keperawanan. Ketiga, karena adanya sistem paksaan dan kekerasan.

Dalam melakukan praktiknya, aktivitas yang dilakukan oleh para PSK ini biasanya dilakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, terorganisir atau individual. Bentuk prostitusi yang dilakukan secara terang-terangan dan terorganisir dicontohkan oleh kebijakan yang disebut sebagai lokalisasi (Patnani, 1999: 58). Praktik yang dilakukan di suatu lokalisasi biasanya terletak jauh dari pemukiman warga agar tidak mudah dijangkau oleh banyak orang. Adanya lokalisasi ini diharapkan untuk menerapkan disiplin

dan kontrol terhadap aktivitas prostitusi serta para PSK tidak beroperasi secara liar di berbagai tempat. Namun seiring perkembangannya, banyak pro kontra oleh berbagai pihak terhadap adanya lokalisasi ini. Selain prostitusi yang dilakukan secara terang-terangan seperti lokalisasi, ada juga bentuk prostitusi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi baik individu maupun terorganisir. Para PSK yang beroperasi dengan cara ini biasanya melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Aktivitas dan tempatnya tidak terorganisir bisa di setiap tempat, baik mencari pelanggan sendiri maupun melalui calo-calo dan panggilan.

Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kemensos Sonny Manalu mengatakan bahwa ada 168 lokalisasi di 24 provinsi dan 76 kabupaten/ kota pada tahun 2013. Sonny juga mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling banyak lokalisasinya dengan jumlah perempuan penghuni lokalisasi mencapai 40 ribu orang. Namun, setelah dilakukannya berbagai upaya, lokalisasi yang masih beroperasi hingga saat ini masih tersisa 43 titik dengan jumlah PSK sekitar 20 ribu orang.

Menurut Idrus Marham (Voaislamtv, 17 Oktober 2013), selaku Menteri Sosial mengatakan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi yang menjadi daerah lokalisasi terbesar di Indonesia, disusul Jawa Barat dan Kalimantan Timur. Berdasarkan data Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial Kemensos, pada tahun 2012 tercatat 7.793 PSK dan 47 lokalisasi di Jawa Timur. Menurut Kadinsos Jawa Barat (Merdeka, 2 Juni 2016), pada tahun 2016 terdapat 11 titik lokalisasi dan 5.271 PSK di Jawa Barat. Sedangkan menurut Kadinsos

Kalimantan Timur (Metro Jambi, 2 Juni 2016), pada tahun 2016 terdapat 1.515 PSK dan 24 lokalisasi di Kalimantan Timur.

Selain kota-kota besar, salah satu karakteristik daerah yang diidentik dengan persoalan prostitusi adalah pertambangan. Berbicara mengenai pertambangan, dalam praktik pertambangan di Indonesia memiliki catatan sejarah yang kelam dan diklaim sebagai perusak lingkungan, kecelakan tambang, rawan konflik sosial, dan timbul masalah sosial lainnya. Seperti yang dinyatakan oleh Yuniarto (2015: 34), bahwa praktik pertambangan di Indonesia umumnya identik dengan budaya kekerasan/ premanisme, prostitusi, perjudian, dan lainnya yang berhubungan dengan pengingkaran terhadap norma-norma agama budaya. Lebih lanjut, Kitula dalam Rahayu (2018: 12) menyatakan bahwa pertambangan yang membawa jumlah pekerja secara massal ke lokasi pertambangan akan berdampak timbulnya prostitusi, perubahan gaya hidup, serta meningkatnya persaingan antar penduduk lokal untuk sumber daya alam.

Seperti yang dikemukakan oleh Bupati Paniai Kota Jayapura Hengky Kayame (Info Papua, 13 Juni 2014), menyatakan bahwa aktivitas di daerah pertambangan emas Kali Degeuwo menimbulkan masalah sosial seperti prostitusi dan miras yang semakin meresahkan masyarakat setempat dan pemerintah daerah. Akibatnya tidak sedikit dari masyarakat mengidap penyakit HIV/AIDS. Selain itu, menurut Thobias Bagubao Ketua Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Woolani Mee dan Moni, mengemukakan bahwa yang lebih merajalela adalah penjual miras yang

ditukar dengan emas alias barter. Tidak hanya itu, di daerah pertambangan batu pasir Kabupaten Banyumas Jawa Tengah juga memiliki masalah sosial akibat aktivitas pertambangan, seperti munculnya usaha prostitusi, konsumtivisme, dan terkikisnya nilai-nilai kearifan lokal (Bargawa, 2015: 61).

Daerah Bangka Belitung adalah daerah pertambangan yang juga memiliki permasalahan sosial, salah satunya yaitu masalah prostitusi. Menurut Akhmad Elvian selaku sejarawan dan budayawan (Bangka Pos, 30 Maret 2019), prostitusi di Bangka Belitung sudah berlangsung sejak masa Hindia Belanda, tepatnya pertengahan abad ke-19.

Pada dasarnya kebutuhan dan kondisi pada saat itu jumlah laki-laki di Bangka Belitung lebih banyak dibandingkan perempuan. Oleh karena itu, mereka harus mendatangkan perempuan untuk memuaskan kepuasan seksual. Perempuan-perempuan yang didatangkan ke Bangka berasal dari Jepang dan Pulau Jawa yang kemudian dipekerjakan sebagai PSK. PSK Jepang dijuluki *karayukisan* yang dijadikan sebagai pemuas nafsu para pria berkulit putih atau orang Eropa. Sementara PSK dari Pulau Jawa dijuluki sebutan *kinet*, yang melayani nafsu para pria kuli tambang timah yang pada umumnya adalah orang-orang China.

Di era globalisasi saat ini, tidak menutup kemungkinan bahwa prostitusi juga masih beroperasi. Apalagi di zaman modern ini tentunya teknologi yang semakin canggih terus dikembangkan seperti salah satunya yaitu media *online*. Kemudahan dalam berkomunikasi melalui media online turut dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan praktik prostitusi secara *online*.

Prostitusi *online* memang menawarkan banyak kemudahan daripada prostitusi *offline*. Beberapa kemudahan yang diperoleh dari sistem prostitusi *online* seperti luasnya jangkauan mucikari dan PSK dalam mencari calon pelanggan. Kemudahan lainnya yaitu gerak aparat keamanan dalam meringkus jaringan prostitusi cukup sulit. Apabila aksinya diketahui oleh aparat keamanan, jaringan prostitusi online tersebut akan segera meninggalkan akses akun media sosial yang digunakan dan selanjutnya beralih ke akun atau situs baru (Utami, dkk, 2017: 69). Umi Salamah selaku salah satu pekerja sosial di Kota Pangkalpinang mengatakan bahwa saat ini tingkat prostitusi *online* di Pangkalpinang lebih tinggi dari pada prostitusi secara *offline*.

Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa praktik prostitusi secara *offline* masih tetap eksis hingga sekarang. Seperti yang terjadi pada beberapa lokalisasi di Kota Pangkalpinang yaitu Teluk Bayur, Pasir Padi, dan Parit Enam. Berdasarkan data terakhir yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, terdapat 169 PSK *offline* yang terdaftar di Kota Pangkalpinang pada tahun 2017.

Dari ketiga lokalisasi tersebut, peneliti hanya berfokus pada lokalisasi yang berada di Parit Enam. Lokalisasi ini di sinyalir oleh adanya kafe-kafe yang dibuka pada malam hari. Hal itu dapat menjadi salah satu alasan para pekerja selain PSK seperti pelayan kafe, juru masak, dan pengelola kafe dapat bertahan di tempat tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, hal itu juga dapat menjadi sebuah taktik yang menggiurkan untuk menarik pelanggan hidung belang.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, pada tahun 2017 terdapat 88 PSK di Parit Enam dengan mayoritas berasal dari Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, para PSK tidak hanya terdiri dari orang-orang yang sehat jasmani namun ada juga yang tuna rungu dan tuna wicara. Sementara berdasarkan hasil observasi peneliti, di tahun 2019 ini terdapat 60 PSK di Parit Enam .

Dalam menjalankan bisnis prostitusi, para pelaku melakukan berbagai strategi untuk mengembangkan bisnisnya. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan membangun dan mengembangkan sebuah jaringan sosial sesama pelaku prostitusi. Jaringan sosial dalam bisnis prostitusi terjadi dalam berbagai bentuk jaringan sosial. Keberadaan aktor-aktor terutama PSK sebagai pelaku praktik prostitusi, serta mucikari sebagai penghubung antara PSK dengan pengguna jasa sangat penting. Hal ini dikarenakan peran mereka dalam mempertahankan kelangsungan jaringan dan membangun jaringan terbukti dalam eksisnya lokalisasi Parit Enam. Melihat dari gambaran ini akan menjadi sebuah kajian yang menarik untuk meneliti tentang jaringan sosial yang ada pada PSK di Parit Enam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi perempuan menjadi PSK di Parit Enam Kota Pangkalpinang?
2. Bagaimana jaringan sosial yang ada pada PSK di Parit Enam Kota Pangkalpinang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi perempuan menjadi PSK di Parit Enam Kota Pangkalpinang.
2. Untuk menganalisis jaringan sosial yang ada pada PSK di Parit Enam Kota Pangkalpinang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan peneliti dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dalam ilmu-ilmu sosial khususnya modal sosial dalam bidang Sosiologi. Adapun penelitian

ini memfokuskan pada terbentuknya jaringan sosial pada lokalisasi prostitusi di Parit Enam Kota Pangkalpinang.

2. Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menentukan kebijakan mengenai upaya pemberantasan prostitusi di Kota Pangkalpinang.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait alasan perempuan menjadi PSK.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca mengenai jaringan sosial yang ada pada PSK di Parit Enam.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu proses penjabaran secara deskriptif mengenai hal-hal yang akan ditulis. Pada penelitian ini diawali dengan mendapatkan fenomena disekitar, lalu dilanjutkan dengan mencari studi literatur terkait dengan permasalahan PSK. Setelah itu melakukan pra observasi untuk mempertajam argumen peneliti.

Pada bab I Pendahuluan, peneliti menjelaskan terlebih dahulu mengenai permasalahan terkait dengan fokus penelitian di dalam latar belakang yang berjudul “Jaringan Sosial Pekerja Seks Komersial (Studi pada PSK Perempuan di Parit Enam Kota Pangkalpinang)”. Selanjutnya terdapat

rumusan masalah yang merupakan pertanyaan yang akan diteliti. Kemudian, adanya tujuan penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Setelah itu, terdapat pula manfaat penelitian yang terdiri atas manfaat teoretis dan manfaat praktis.

Pada bab II menentukan tinjauan pustaka dari berbagai hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti. Setelah itu adanya kerangka teoritis yang merupakan alat pembedah dalam mengkaji permasalahan yang diteliti. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori jaringan sosial Ruddy Agusyanto. Lalu pada tahap terakhir adanya kerangka berpikir. Kerangka berpikir berguna untuk memudahkan peneliti memahami alur pikir dalam menganalisis penelitian yang akan diteliti.

Pada bab III, peneliti menjelaskan tentang metode penelitian. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Kemudian, lokasi penelitian berada di Kota Pangkalpinang tepatnya di lokalisasi Parit Enam. Jenis dan sumber data penelitian ini berasal dari 2 sumber data, yaitu sumber data primer berupa hasil wawancara dengan informan dan sumber data sekunder berupa data penunjang berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan skripsi terdahulu yang terkait dengan fokus penelitian. Selanjutnya subyek pada penelitian ini para PSK di Parit Enam yang merupakan informan kunci. Sebagai informan tambahan yaitu pengelola lokalisasi Parit Enam, mucikari, serta Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang. Pada teknik pengumpulan informan menggunakan teknik

purposive sampling. Teknik pengumpulan data akan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, observasi non partisipan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan tahap reduksi data, display data, serta penarikan kesimpulan dan atau verifikasi data.

Pada bab IV, peneliti akan memberikan gambaran umum mengenai fokus penelitian. Pada penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran umum mengenai lokalisasi Parit Enam. Adapun gambaran yang dimaksud meliputi kondisi geografis, demografis, dan sosial budaya lokalisasi serta gambaran PSK.

Pada bab V, peneliti akan menjelaskan hasil dan pembahasan penelitian dari jawaban pertanyaan-pertanyaan terkait dengan rumusan masalah. Pada bab ini menjelaskan mengenai jaringan sosial pada PSK di Parit Enam dan faktor-faktor yang melatarbelakangi PSK perempuan di Parit Enam. Pemaparan dilakukan dengan menggunakan teks naratif serta implikasi teori yang dimana hasil penelitian ini akan dianalisis dengan teori yang telah digunakan.

Pada bab VI, peneliti akan menjelaskan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian, saran yang berupa masukan-masukan membangun bagi berbagai pihak terkait permasalahan PSK yang ada di Parit Enam.